

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Ali, A. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. Jakarta: Kencana.
- Amiruddin dan H. Zainal Asikin. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: Rajawali Pers.
- Jumadi. (2009). *Tawuran Mahasiswa: Konflik Sosial di Makassar*. Makassar: Rayhan Intermedia.
- M.D, R. (2010). *Upaya Polri Dalam Mensosialisasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Dalam Rangka Meminimalisir Terjadinya Tindak Pidana Pelanggaran Lalu Lintas*. Malang: Univeristas Brawijaya.
- Muhammad, A. K. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Fall. (1991). *Penyaringan Hukum Pidana oleh Polisi (diskresi kepolisian)*. Bandung: Pradyana Paramita.
- Wiyata, Latief. (1993). *Gwelddadige Eigenritchting op Madura*
- Rahardi. (2010). *Memahami Hukum Kepolisian*. Yogyakarta: Laksbang Persino.
- Rahardjo, S. (2002). *Polisi Sipil Dalam Perubahan Sosial di Indonesia*. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*.

Yogyakarta: Genta Publishing.

Ridwan. (2014). *Diskresi dan Tanggung Jawab Pemerintah*.

Yogyakarta: FH UII Press.

Santoso, Thomas. (2002). *Kekerasan Agama Tanpa Agama*. Jakarta:

Pustaka Utan Kayu.

Suteki, & Tuafani, G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: (Filsafat,*

Teori, dan Praktik). Depok: Rajawali Pers.

Wiyata, Latief. (2006). *Carok: Konflik Kekerasan dan Harga Diri Orang*

Madura. Yogyakarta: LkiS.

2. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan

Menyampaikan Pendapat di muka Umum;

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara

Republik Indonesia;

Peraturan Kapolri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengendalian Massa;

Prosedur Tetap Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2010 tentang Penanggulangan Anarki;

Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Tata Cara

Penyelenggaraan Pelayanan, Pengamanan, dan Penanganan

Perkara Penyampaian Pendapat di Muka Umum

3. Jurnal

De Jonge, Huub. (1993). *Gewelddadige Eigenrichting op Madura*” dalam H. Slaats (ed.). *Liber Amicorum Moh. Koesnoe*. Surabaya: Airlangga University Press.

Aulianisa, S. S., & Aprilia, A. H. (2020). Tindakan Represif Aparat Kepolisian terhadap Massa Demonstrasi: Pengamanan atau Pengkekangan Kebebasan Berpendapat?. *Padjajaran Law Review*, 7(2), 26-37.

Budiantara, I. N., Dewi, A. A. S. L., & Utama, I. N. (2021). Kewenangan Kepolisian Daerah Bali dalam Penegakan Hukum Terhadap Aksi Unjuk Rasa yang Anarkis. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 2(3), 575-581.

Faredo Yudasena, Prima Angkupi, Intan Pelangi (2021). Peran Kepolsian Dalam Mencegah Tindak Kerushan Demonstrasi, *Justice: Jurnal Hukum*, Vol 1 No. 1.

Hasse J. (2012). *Anarkisme Demonstrasi Mahasiswa: Studi Kasus Pada Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*, Vol.3 No.1, *Jurnal Studi Pemerintahan*.

Malau, P. (2019). Analisis Juridis Status Kewarganegaraan Atas Sikap Kontradiktif Terhadap Ideologi Negara Dalam Perspektif Kebebasan Mengeluarkan Pendapat. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 7(1), 208-227.

- Priyantoko, G. (2017). Penerapan Diskresi Kepolisian Dalam Penanganan Unjuk Rasa. *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 109-136.
- Rochmawati. (2017) *Dinamika Kelompok Sosial Budaya Di Kota Makassar: Memudarnya Stratifikasi Sosial Berbasis Keturunan*, Volume 19 No. 2, *Jurnal Masyarakat dan Budaya*.
- Sulaiman, S.H. *Diskresi dan Penerapannya, Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung*.
- Susanto, M. I. (2019). Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia. *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi*, 2(2), 225-2.
- Iswahyudi, A., & Mahmudi, I. (2016). Pengaruh mengikuti ormawa dan regulasi diri terhadap prokratinasi mahasiswa dalam menyelesaikan skripsi di fakultas ilmu Pendidikan ikip pgri madiunn tahun akademik 2015/2016. *Jurnal Ilmiah Counsellia*, 6(2), 41-55.